

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 22 responden, maka diperoleh gambaran mengenai Praktik Perwalian dalam Akad Nikah pada Masyarakat Banjar, yaitu:

A. Paparan Data Responden dan Informan tentang Praktik Perwalian dalam Akad Nikah pada Masyarakat Banjar.

1. Identitas Responden

Yang dimaksud dengan identitas responden disini adalah mengenai biodata diri para responden dalam penelitian ini, meliputi: umur, pendidikan, dan pekerjaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini:

a) Umur dan tingkat pendidikan

Umur yang dimaksud disini ialah umur dari seluruh responden yang dijadikan sampel penelitian ini, yang dihitung dari sejak kelahirannya sampai sekarang. Dalam hal ini para responden yang paling muda adalah berusia 43 tahun dan tertua adalah 67 tahun.

Pendidikan yang dimaksudkan disini ialah pendidikan/keilmuan yang pernah ditempuh dan diselesaikan oleh para responden. Dalam hal ini pendidikan yang ditempuh responden dikategorikan dalam pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang pernah diselesaikan para responden yang dilaksanakan oleh lembaga tertentu yang berstruktur memiliki jenjang tingkat tertentu, bersifat umum atau agama,

dilaksanakan pemerintah atau swasta dan mempunyai tempat tertentu. Pelaksanaannya mulai dari tingkat dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi.

Pada tingkat pendidikan formal ini, maka pendidikan responden yang paling rendah adalah lulusan SD dan yang tertinggi adalah lulusan sarjana (S.1). Dengan demikian dapat memberikan apa saja alasan-alasan mereka berwakil wali sesuai tingkat keilmuan/pendidikan yang mereka miliki.

Untuk lebih jelasnya mengenai umur dan tingkat pendidikan formal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Umur dan Tingkat Pendidikan Formal Responden

Umur responden	Pendidikan				F	%
	SD	SMP	SMA	S1		
>43	4	-	1	2	7 orang	31,8%
>53	6	-	1	2	9 orang	40,9%
>63	2	3	1	-	6 orang	27,2%
Jumlah	12	3	3	4	22 orang	100%
%	54,5%	13,6%	13,6%	18,2%		

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa responden yang berusia lebih dari 43 tahun ada 7 orang dengan jenjang pendidikan yang berbeda-beda seperti lulusan SD ada 4 orang, yang berpendidikan SMP tidak ada, lulusan SMA ada 1 orang dan yang sudah S1 ada 2 orang dengan total persentasi ada 31,8%. Sedangkan yang berusia lebih dari 53 tahun ada 9 orang dengan pendidikan SD ada 6 orang, yang berpendidikan SD tidak ada, lulusan SMA ada 1 orang dan yang berpendidikan Perguruan Tinggi S1 ada 2 orang dengan total persentasi 40,9%. Dan yang berusia diatas 63 tahun ada 6 orang dengan pendidikan SD ada 2 orang, lulusan SMP ada 3 orang dan lulusan SMA ada 1 orang, sedangkan yang berpendidikan S1 tidak ada dengan persentasi 27,2%. Dapat dilihat dari usia seluruh responden diatas yang terbanyak adalah responden yang berusia diatas 53 tahun ada sekitar 9 orang.

Sedangkan tingkat pendidikan formal responden menurut data diatas terdiri dari 12 orang yang lulusan SD dengan total persentasi 54,5%, yang berpendidikan SMP ada 3 orang dengan persentasi 13,6%, yang berpendidikan SMA juga ada 3 orang dengan persentasi yang sama yaitu 13,6%, dan yang berpendidikan Perguruan Tinggi S1 ada 4 orang dengan persentasi yaitu sekitar 18,2%. Dari tingkat pendidikan formal responden diatas yang terbanyak adalah yang berpendidikan hanya sampai tingkat Sekolah Dasar (SD) yaitu sebanyak 12 orang.

b) Pekerjaan Responden

Yang dimaksud dengan pekerjaan disini ialah mengenai segala usaha yang dapat menghasilkan dan merupakan sumber usaha pokok responden untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini jenis pekerjaan yang dipilih adalah dari golongan petani, PNS, pedagang, wiraswasta.

Untuk lebih jelasnya mengenai pekerjaan para responden ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Pekerjaan Responden

No.	Pekerjaan Responden	Frekuensi	Persentasi
1	Petani	6 orang	27,2%
2	PNS	4 orang	18,2%
3	Pedagang	3 orang	13,6%
4	Wiraswasta	9 orang	41%
Jumlah		22 orang	100%

Dari data diatas dapat dilihat pekerjaan para responden adalah sebagai petani ada 6 orang dengan persentasi 27,2%, yang bekerja sebagai PNS ada 4 orang dengan persentasi 18,2%, yang bekerja sebagai pedagang ada sekitar 3 orang dengan persentasi

13,6% dan yang bekerja sebagai wiraswasta ada 9 orang dengan persentasi sekitar 41%. Dapat dilihat bahwa pekerjaan responden yang terbanyak adalah yang bekerja sebagai wiraswasta.

2. Identitas Informan

Yang dimaksud dengan identitas informan disini adalah mengenai biodata diri para informan dalam penelitian ini, meliputi: nama, jabatan dan alamat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini:

Tabel 4
Identitas Informan

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1	M. Yusran	Kepala KUA Banjarmasin Timur	-
2	Hasan Basri	Wakil Kepala KUA Banjarmasin Timur	-
3	H. Syahrhan Abdul Hamid	Penghulu/pembantu PPN	Pemurus Luar
4	Drs. Mukhyar Usman	Tokoh Agama	Gatot Subroto

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur.

Adapun identitas informan diatas, pada waktu peneliti melakukan riset jabatan Kepala KUA masih dijabat oleh Bapak M. Yusran dan wakil Kepala KUA oleh Bapak Hasan Basri. Dan sekarang yang menjabat sebagai Kepala KUA yang baru periode 2013

adalah Bapak Ismail, S.Ag. Informan diatas merupakan termasuk orang yang pernah menjadi wakil wali dari wali nasab sehingga dapat memberikan informasi tentang praktik perwalian yang terjadi.

B. Gambaran Praktik Perwalian dalam Akad Nikah pada Masyarakat Banjar

Syarat utama sebuah pernikahan yang *syar'i* itu adalah adanya wali yang melakukan akad dengan calon suami anak gadisnya. Sebab pada hakikatnya, justru wali itulah yang melakukan akad (perjanjian). Kedudukan wali dalam sebuah pernikahan adalah ibarat sebagai pemain utama. Lafaz akad nikah itu justru diucapkan oleh wali, bukan oleh pengantin wanita.

Selanjutnya dalam proses akad itu, seorang wali boleh saja mewakilkan akad itu kepada orang lain yang dipercayainya untuk melakukan akad. Istilahnya adalah *taukil* atau *waka>lah*}. Mirip dengan seseorang yang hendak membeli suatu barang lalu mengutus orang lain untuk mewakilinya dalam transaksi.

Seseorang tidak sah melakukan akad untuk anak wanita orang lain yang bukan anaknya sendiri, kecuali bila ada *taukil* (perwakilan) atau permintaan dari wali untuk melakukan akad. Bagi masyarakat Banjar, mereka biasa melakukan *waka>lah*} wali dalam setiap prosesi pernikahan. Fenomena *waka>lah*} wali (*taukil* wali) merupakan hal yang lumrah dan biasa dilakukan oleh mereka yang akan menikahkan puterinya. Artinya, bahwa hampir di setiap prosesi pernikahan, mayoritas masyarakat Banjar

(terutama wali nikah) memilih *waka>lah*} wali dari pada menikahkan putrinya di bawah perwalian mereka. Seperti yang dijelaskan bapak Syahrhan Abdul Hamid.¹

Pada dasarnya istilah *waka>lah*} wali tidak dikenal oleh masyarakat Banjar, namun mereka menggunakan istilah *taukil* wali untuk makna yang sama. *Taukil* adalah perwakilan wali. Di mana seorang ayah dari wanita memberikan wewenang kepada seorang laki-laki lain, tidak harus keluarganya, yang penting muslim dan dipercaya oleh si ayah untuk melaksanakan akad nikah puterinya dengan calon suaminya.”

Proses awal yang harus dilakukan sebelum *waka>lah*} wali adalah akad penyerahan kuasa atau ikrar *taukil* dari wali kepada pihak yang akan diwakilkan. Pada dasarnya sebelum ikrar tersebut dilakukan, petugas KUA atau penghulu atau tokoh agama setempat sudah mengingatkan kepada wali nya agar dia sendiri yang menikahkan putrinya dan sudah mengingatkan bahwa lebih *afd}ol* kalau yang menikahkan itu ayahnya sendiri. Pentingnya mengingatkan wali nikah untuk menggunakan hak perwaliannya di dalam prosesi akad nikah merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Paling tidak hal itu akan menjadi proses pembelajaran untuk para wali nikah. Seperti yang dijelaskan Bapak Drs. M. Yusran.²

Prosesi ijab qabul merupakan tahapan awal yang harus dilalui dalam *waka>lah*} wali. Karena mengingat diperlukan pemenuhan atas rukun-rukunnya agar sempurna

¹ H. Syahrhan Abdul Hamid. Pembantu PPN di wilayah Pemurus Luar. Wawancara pribadi di Masjid Nurul Ibadah. Rabu 28 Juli 2013.

² Drs. M. Yusran. Kepala KUA Kec. Banjarmasin Timur. Wawancara pribadi di KUA Kec. Banjarmasin Timur. Selasa 04 Desember 2012.

suatu akad *waka>lah*} tersebut. Adapun rukun sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya adalah adanya: (1). al-*Muwakkil* atau yang mewakilkan suatu perkara, (2). al-*Wakil*, yaitu orang yang menerima perwakilan, (3). *Muwakkal fih* atau perkara yang diwakilkan dan . (4). *Sig\at at-taukil* atau aqad perwakilan,

Adapun bentuk akad yang biasa diucapkan pada saat akad ijab qabul *waka>lah*} wali adalah terdiri dari ucapan ijab yang isinya penyerahan hak perwalian. Sementara qabul adalah ucapan penerimaan atas perwalian tersebut.

Contoh redaksional ijab qabul wali kepada wakil yang biasa diucapkan saat *waka>lah*} wali:

"Bapak penghulu/naib, saya wakilkan kepada Bapak untuk mewalikan dan menikahkan anak perempuan saya/saudara perempuan saya yang bernama.....binti.....dengan seorang laki-laki yang bernama.....bin.....dengan mahar.....dibayar tunai."

Wakil menjawab:

"Saya terima untuk mewalikan dan menikahkan.....binti.....dengan seorang laki-laki yang bernama.....bin.....dengan mahar.....dibayar tunai."

Contoh redaksional ijab qabul dari wakil kepada calon mempelai laki-laki:

"Saya nikahkan seorang perempuan yang bernama.....binti.....dengan engkaubin.....yang walinya telah berwakil kepada saya dengan mahar.....dibayar tunai."

Demikianlah redaksional yang biasa diucapkan oleh wali dan wakil wali seperti yang dijelaskan Bapak Hasan Basri.³

Namun yang menjadi catatan adalah dimana ucapan itu dilakukan. Pengucapan ijab qabul *waka>lah* wali yang terjadi biasanya dilakukan di dalam majelis nikah. Namun bukan menjadi bagian dari ritual akad nikah tersebut. Ijab qabul akad perwakilan wali tersebut diluar acara inti. Di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur dalam hal pengucapan penyerahan perwakilan wali dilaksanakan di luar majelis artinya sebelum pernikahan dilakukan, si wali menyerahkan dulu hak perwaliannya kepada petugas KUA atau orang lain dan perpindahan perwakilan ini dilakukan dengan secara lisan atau tidak tertulis. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak M. Yusran.⁴

Pada praktik perwalian dalam akad nikah yang wali tersebut berwakil pada petugas KUA atau penghulu setempat, setelah wali tersebut berwakil biasanya wali tersebut ada yang keluar dari majelis dan ada juga yang tetap duduk didalam majelis nikah. Kalau di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur biasanya wali tersebut tetap duduk di majelis untuk menyaksikan pernikahan putrinya. Tapi ada atau tidaknya wali tersebut dalam majelis nikah tidak akan berpengaruh. Artinya dia sudah bukan menjadi wali lagi, hanya sebagai hadirin biasa.

Yang terjadi pada masyarakat Banjar mayoritas wali nikah mewakilkan haknya kepada orang lain. Biasanya kiai dan tokoh agama atau penghulu dari KUA yang

³ Hasan Basri. Wakil Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Timur. Wawancara pribadi di KUA Kec. Banjarmasin Timur. Rabu 05 Desember 2012.

⁴ Drs. M. Yusran. Kepala KUA Kec. Banjarmasin Timur. Wawancara pribadi di KUA Kec. Banjarmasin Timur. Selasa 04 Desember 2012.

mewilayahi kelurahan tersebut yang menjadi wakil dari orang tua mempelai. Seperti yang dijelaskan bapak Mukhyar Usman.⁵

Yang penting, proses pemberian wewenang sebagai pihak yang mewakili ayah kandung sah dan dibenarkan secara yakin tanpa diperlukan harus ada saksi. Namun demikian, tokoh masyarakat setempat mensyaratkan saksi minimal dua (2) orang yang sudah dewasa.

Akad nikah atau ijab qabul yang dilakukan oleh masing-masing wakil dari kedua belah pihak adalah sebuah bentuk keluwesan sekaligus keluasan syariah Islam. Namun kalau tiba-tiba ada orang mengangkat diri menjadi wakil tanpa ada pemberian wewenang dari yang punya hak yaitu wali atau mempelai laki-laki secara sah, maka orang ini sama sekali tidak berhak melakukan akad nikah. Kalau hal itu terjadi, maka nikah itu tidak sah di mata Allah SWT.

C. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Praktik Perwalian Nikah yang diwakilkan

Penting untuk diketahui bahwa seorang wali berhak mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski orang tersebut tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu bisa dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta tokoh ulama atau petugas KUA setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah. Dan untuk itu harus ada akad antara wali dengan orang yang diberi hak untuk mewakilinya.

⁵ Drs. Mukhyar Usman. Tokoh Agama. Wawancara pribadi di rumah beliau. Kamis 29 Juli 2013.

Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang telah penulis tetapkan sebagai responden yang pernah mewakilkan haknya sebagai wali dalam akad nikah putrinya dengan uraian sebagai berikut:

(Responden 1): Bapak MJ merupakan ayah kandung dari RV yang tinggal di Kelurahan Kuripan, ketika dia menikahkan putrinya, dia mewakilkan hak perwaliannya kepada penghulu karena sebenarnya dia tidak suka dengan calon suami pilihan putrinya tersebut, bahkan seluruh keluarga pun sudah melarang, karena calon suami pilihan RV dianggap tidak sederajat atau ekonominya lebih rendah dari pihak perempuan. Tapi karena itu sudah menjadi pilihan putrinya, dia tetap menikahkannya dengan catatan dia tidak mau menikahkan sendiri tapi mewakilkannya kepada petugas KUA.

(Responden 2): Bapak AH tinggal di Kelurahan Kebun Bunga, dia merupakan kakak kandung dari RR yang merupakan satu-satunya wali nasab yang ada karena ayahnya sudah meninggal dan saudara-saudara ayahnya pun juga sudah meninggal semua. Dia menikahkan adik satu-satunya itu di mesjid setempat. Dia juga mewakilkan hak perwaliannya kepada penghulu karena dia merasa gugup.

(Responden 3): Bapak RS tinggal di Kelurahan Sungai Lulut dan merupakan paman dari M yang bertindak sebagai wali nasab karena ayah kandung M sudah meninggal. Dia mewakilkan hak perwaliannya kepada Kepala KUA karena dia gugup dan tidak terbiasa berhadapan atau berbicara dihadapan orang banyak.

(Responden 4): Bapak MQ yang tinggal di Kelurahan Kebun Bunga merupakan ayah kandung dari P. Ketika MQ menikahkan P, MQ mewakilkan hak perwaliannya kepada penghulu karena gugup kemudian lupa dengan kata-kata yang akan diucapkan

karena faktor gugup tadi. Dan suka gemetar kalo sudah berhadapan dengan orang banyak.

(Responden 5, 6 dan 7): Bapak RR, D, AK menikahkan putri mereka pada hari yang sama di tempat yang sama yaitu di Balai Nikah KUA Kecamatan Banjarmasin Timur juga mewakilkan hak perwaliannya pada petugas KUA karena faktor gugup sehingga tidak bisa mengucapkan lafaz ijab. Karena pernikahan merupakan hal yang sakral dan takut kalau salah dalam mengucapkan lafal tersebut sehingga mereka berfikiran lebih baik diwakilkan saja.

(Responden 8, 9 dan 10): Bapak S, B dan MR yang juga mewakilkan hak perwaliannya kepada kiai karena lebih alim dan merasa terhormat dengan kehadiran kiai yang sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir dalam prosesi pernikahan putrinya.

(Responden 11 dan 12): Bapak J dan RF ketika menikahkan putrinya yang kemudian mewakilkan hak perwaliannya kepada Kepala KUA karena merasa tidak berpendidikan yang tinggi dan hanya lulusan Sekolah Dasar saja karena faktor ekonomi responden.

(Responden 13): Bapak RM merupakan ayah kandung dari K yang tinggal di kelurahan Pemurus Luar dan ketika dia menikahkan putrinya, dia mewakilkan hak perwaliannya kepada petugas KUA karena dia merasa masih banyak dosa atas semua perbuatannya di masa lalu sebagai seorang preman dan pernah masuk penjara.

(Responden 14): Bapak Z adalah ayah kandung dari SN, ketika dia menikahkan putrinya yang pernikahan itu dilangsungkan di rumah, dia mewakilkan hak

perwaliannya kepada penghulu setempat karena dia merasa bukan orang yang baik, dia merasa masih banyak dosa yang dilakukan semasa hidupnya.

(Responden 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22): Bapak SY, MU, MS, J, HM, F, R, AD.

Responden diatas juga mewakilkan hak perwalian dalam menikahkan putri mereka kepada petugas KUA mereka mempunyai alasan yang sama yaitu karena sudah merupakan kebiasaan atau adat setempat dan kebanyakannya memang berwakil dan mereka juga tidak mau repot dalam hal menikahkan putri mereka.

Berdasarkan banyaknya fenomena diatas yang terjadi di masyarakat tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik perwalian yang berwakil wali tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5
Praktik Perwalian dalam Akad Nikah pada Masyarakat Banjar

No.	Praktik Perwalian dalam Akad Nikah	Faktor Penyebab Terjadinya Praktik tersebut	Responden
1	Wali nikah mewakilkan dirinya pada petugas KUA atau penghulu setempat.	Karena ketidaksukaan orang tua terhadap calon mempelai laki-laki.	1
		Karena gugup	2, 3, 4, 5, 6, 7
		Karena merasa tidak berpendidikan yang tinggi	11, 12
		Karena merasa masih banyak dosa	13, 14
		Karena memang sudah menjadi kebiasaaan/adat	15, 16, 17, 18,

			19, 20, 21, 22
2	Wali nikah mewakilkan dirinya pada alim ulama atau tokoh agama setempat.	Karena merasa bangga dan terhormat apabila berwakil pada alim ulama atau tokoh agama.	8, 9, 10

D. Analisis Data

Dari 22 responden yang tinggal disekitar wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur dan juga 4 informan yang peneliti wawancarai sepakat bahwa dalam suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya seorang wali, baik itu wali nasab atau wali hakim karena wali ini merupakan salah satu dari rukun nikah. Dalam penelitian ini dapat diketahui gambaran praktik perwalian yang walinya berwakil (*wakalah*) pada orang lain dan juga ada beberapa faktor yang melatarbelakangi wali nasab tersebut berwakil wali.

Bahwasanya wali nikah menurut Jumhur Ulama' merupakan salah satu rukun nikah sehingga wali nikah harus ada dalam akad nikah, tanpa adanya wali maka pernikahan dianggap tidak sah. Hal ini sesuai dengan hadis berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَيْمَانُ امْرَأَةٍ نِكَاحٌ بَعِيرٍ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَإِنْ كَانَتْ بَاطِلًا)) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ((فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَا جَرُّوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ)) (رواه الترمذي و بن ماجه)⁶

“Dari Muhammad bin Kasir menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan bahwa, Ibnu Juraij menceritakan, dari Sulaiman bin Musa, dari Zuhri, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah RA dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Perempuan yang manapun

⁶ Sidqi> Muhammad Jami>I, *Sunan Abu> Daud*, (Bairu>t: Da>rul Fikr, 1994), Juz I, h.478.

menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya bathil.” Beliau mengucapkannya tiga kali, “Jika lakinya telah mengumpulinya, maka maharnya baginya karena sesuatu yang didapat darinya. Jika mereka berselisih, maka sultanlah wali orang yang tidak punya wali.”⁷

Pada dasarnya hukum asal *waka>lah*} atau *taukil* adalah *jaiz* (boleh). *Waka>lah*} atau *taukil* terkadang hukumnya sunah jika menolong terhadap perkara yang disunahkan, terkadang makruh jika menolong terhadap perkara yang dimakruhkan, terkadang haram jika menolong terhadap perbuatan haram dan terkadang wajib jika menolak bahaya dari orang yang diwakili.⁸ Dalam permasalahan *taukil* wali nikah adalah *jaiz* (boleh) seperti halnya hukum asal *wakalah* .

Hal ini sesuai dengan kaidah:

كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ حَقَّ التَّصَرُّفِ فِي شَيْءٍ كَانَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ فِيهِ مَا دَمَ ذَلِكَ الْأَمْرُ يَقْبَلُ النِّيَابَةَ.⁹
“Setiap orang memiliki hak untuk menjalankan urusannya sendiri, dan baginya pula terdapat kebolehan untuk mewakilkan urusan tersebut kepada orang lain selama urusan tersebut bisa digantikan oleh orang lain.”

Memang bukan menjadi sebuah pelanggaran jika seorang wali mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski orang tersebut tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu bisa dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta tokoh ulama

⁷ Sidqi> Muh}ammad Jami>l, *Sunan Abu> Daud* diterjemahkan oleh H. Bey Arifin dkk, dengan judul *Tarjamah Sunan Abu Daud*, (Semarang: Asy Syifa, 1992), h. 27.

⁸Wahbah} az-Zuh}ayli>, *al-Fiqh}ul 'Isla>mi> wa 'Adillatuh}u*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, dengan judul *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2010) Jilid 9. h. 595.

⁹ Wahbah} az-Zuh}ayli>, *al-Fiqh}ul 'Isla>mi> wa 'Adillatuh}u*, (Damaskus: Darul Fikr, t,th). Juz 9. h. 6731

setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah. Dan untuk itu harus ada akad antara wali dengan orang yang diberi hak untuk mewakilinya.

Dalam hal praktik berwakil wali ini ada banyak faktor yang terjadi di masyarakat, seperti:

1. Faktor ketidaksukaan orang tua (Responden 1)

Berbakti kepada kedua orang tua termasuk ibadah dan sangat besar pahalanya. Karena orang tualah yang mengasuh, membesarkan, mendidik, dan menghidupi anak-anaknya. Oleh sebab itu besarnya jasa orang tua tidak mungkin bisa dibalas dengan segala bentuk balasan dari anaknya, baik berupa jasa maupun materi, termasuk kemewahan dunia. Mengingat begitu besarnya jasa kedua orang tua terhadap anaknya, maka wajib hukumnya bagi seorang anak untuk menghormati kedua orang tuanya.

Namun dalam hal pernikahan, ketika orang tua tidak suka terhadap calon suami pilihan putrinya adalah harus dilihat dulu tidak suka dalam hal apa saja sehingga si wali mewakilkan hak perwaliannya pada orang lain. Karena menurut catatan penulis bahwa ini sudah termasuk pada kategori *kufu'* dalam perkawinan.

Kufu' berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Ibnu Hazm berpendapat bahwa semua orang Islam asalkan tidak berzina, berhak kawin dengan semua wanita Muslimah. Dan semua orang Islam adalah bersaudara. Walaupun seorang muslim yang sangat fasik, asalkan tidak berzina ia adalah *kufu'* untuk wanita Islam yang fasik, asalkan bukan perempuan pezina.

Segolongan Ulama berpendapat bahwa soal *kufu'* harus diperhatikan, tetapi yang menjadi ukuran *kufu'* ialah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan dengan ukuran

keturunan, pekerjaan, kekayaan dan lain sebagainya. Jadi laki-laki yang sholeh walaupun keturunannya rendah, berhak untuk kawin dengan wanita yang berderajat tinggi. Laki-laki yang fakir berhak kawin dengan wanita yang kaya raya, dengan syarat bahwa pihak laki-lakinya adalah seorang Muslim dan tak seorangpun walinya yang menghalangi atau menuntut pembatalan. Imam Malik berpendapat bahwa ukuran *kufu*’ adalah dari segi agamanya saja, tidak dari yang lain. Hal-hal yang biasanya dianggap jadi ukuran *kufu*’ ialah agamanya, keturunannya, merdeka, pekerjaan dan kekayaannya.

Oleh karena itu tidak ada alasan bagi wali untuk tidak menyukai calon suami pilihan putrinya jika sudah memenuhi ukuran kekufu’an dalam pernikahan. Dan alangkah lebih baiknya jika si wali sendiri yang menikahkan putrinya karena merupakan tanggung jawab terakhir sebagai seorang ayah.

2. Faktor gugup (Responden 2, 3, 4, 5, 6 dan 7).

Gugup merupakan hal yang wajar dan lumrah pada setiap diri manusia. Namun itu dapat dihindari, setidaknya dikurangi karena orang tua lebih afd}al dalam menikahkan putrinya dan sebisa mungkin sebaiknya orang tua yang harus menikahkan. Seperti diketahui bahwa wali adalah syarat sah nikah yang dalam istilah fikih menurut Abdurrahman Al jaziri dari kitab *Fiqh ‘Ala Mazhabil Arba’ah* yaitu :

أَوَّلِي فِي النِّكَاحِ هُوَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِهِ¹⁰

“Wali dalam pernikahan ialah orang yang tergantung atas sahnya akad nikah, maka tidak sah akad nikah tanpa wali”.

¹⁰ Abdurrahman A. Jaziri, *kitabul Fiqh ‘Ala Mazhabil Arba’ah*, (Beirut : Darul Fikr, t,th), jilid IV, h. 26.

Dari istilah fikih diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang melakukan akad nikah mewakili pihak mempelai wanita, karena wali merupakan syarat sah nikah, dan akad nikah yang dilakukan tanpa wali dinyatakan tidak sah.

Adanya seorang wali dalam pelaksanaan akad nikah merupakan suatu keharusan sehingga pernikahan tidak sah dan batal demi hukum apabila dilangsungkan tanpa adanya wali. Wali dalam perkawinan di tempatkan dalam rukun nikah menurut jumbuh ulama. Dalam akad nikah, wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.¹¹ Hal senada juga dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 19, yang berbunyi: *“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.”*

Karena wanita itu pada umumnya adalah pemalu, maka pengucapan ijab itu perlu diwakilkan kepada walinya, jadi wali itu sebenarnya wakil dari pengantin perempuan, biasanya diwakili oleh ayahnya, bila ayahnya tidak ada, dapat digantikan oleh kakeknya (ayah dari ayah). Wali nikah yang demikian itu disebut wali nikah yang memaksa (*mujbir*). Hal ini berarti bahwa fungsi wali dalam pernikahan adalah untuk menjadi wakil dari pihak perempuan untuk mengucapkan ijab dalam akad nikahnya.¹²

Oleh karena itu sebaiknya wali nasab sendiri yang harus mengucapkan lafaz ijab tersebut tanpa harus mewakilkannya karena pasti anak perempuannya sangat senang jika

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

ayahnya sendiri yang menikahkan. Dan ketika perasaan gugup itu muncul, pasti akan mempengaruhi pengucapan lafaz ijab qabul yang akan diucapkan wali. Oleh karena itu, sebelum hari pernikahan dilaksanakan hendaknya wali berlatih dahulu mengucapkan lafaz ijab nikah agar tidak gugup dan salah mengucapkan lafaz nantinya.

3. Faktor karena bangga dan merasa terhormat. (Responden 8, 9 dan 10)

Sikap hormat dan tawadhu' kepada para guru amat tinggi, bahkan dalam berdoa sendiri mereka mendahulukan para guru, baru kemudian orang tua karena para guru lebih besar daripada hak orang tua. Orang tua merupakan sebab kehadiran manusia di dunia fana, sedangkan guru bermanfaat bagi manusia untuk mengarungi kehidupan kekal. Kalaupun bukan karena jerih payah guru, maka usaha orang tua akan sia-sia dan tidak bermanfaat. Karena para guru yang memberikan manusia bekal menuju kehidupan akhirat yang kekal".

Namun lain halnya dalam pernikahan, orang tua mempunyai kedudukan lebih tinggi sebagai wali nikah dalam menikahkan anaknya, walaupun pada saat pernikahan itu dihadiri oleh ulama atau tokoh agama setempat dan perwalian boleh diwakilkan kepada beliau, tapi tetap ayahnya lah yang lebih afdol untuk menikahkan anaknya. Kita memang diharuskan menghormati ulama, tapi jangan berlebih-lebihan sehingga mengesampingkan fungsi dan peran wali nasab dalam menikahkan anaknya. Karena wali merupakan pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.

Adapun urutan wali dalam pernikahan yang paling utama adalah sebagai berikut

:

1. Ayah
2. Kakek laki-laki (ayah dari ayah)
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Putra saudara seayah seibu (keponakan)
6. Putra saudara seayah
7. Paman (saudara laki-laki ayah)

Anak laki-laki paman, menurut urutan-urutan tersebut (artinya: yang seayah seibu didahulukan daripada yang hanya seayah). Apabila mereka sudah tidak ada semua, maka yang berhak menjadi wali adalah tuan yang memerdekakannya.

Dari urutan tersebut dapat dilihat bahwa ayah merupakan urutan yang paling utama dan mempunyai peranan penting sebagai wali nikah.

4. Faktor karena merasa tidak berpendidikan yang tinggi (Responden 11 dan 12)

Umat Islam wajib menuntut ilmu yang selalu dibutuhkan setiap saat. Ia wajib shalat, berarti wajib pula mengetahui ilmu mengenai shalat. Diwajibkan puasa, zakat, haji dan sebagainya, berarti wajib pula mengetahui ilmu yang berkaitan dengan puasa, zakat, haji, dan sebagainya sehingga apa yang dilakukannya mempunyai dasar termasuk yang berkaitan dengan wali nikah. Dengan ilmu berarti manusia mengetahui mana yang harus dilakukan mana yang tidak boleh.

Menuntut ilmu tidak hanya terbatas pada hal-hal ke akhiratan saja tetapi juga tentang keduniaan. Jelaslah kunci utama keberhasilan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat adalah ilmu. Ilmu tidak hanya didapat dari pendidikan formal saja, yang penting kita mau belajar. Begitupun wali nikah yang tidak menikahkan putrinya sendiri hanya karena merasa berpendidikan rendah. Sebelum hari pernikahan, si wali

bisa belajar dulu tentang bagaimana cara menikahkan atau berlatih dulu menjadi wali kepada pihak KUA atau orang yang mengetahui tentang wali.

Dalam syarat sebagai seorang wali, salah satunya memang ada disebutkan bahwa wali itu haruslah cerdas. Yang dimaksud cerdas ialah mengetahui tentang nikah yang menyangkut persesuaian mempelai (*kafa>'ah*) maupun faedah, hikmah dari pernikahan tersebut. Cerdas juga dapat diartikan sebagai orang yang tidak menghamburkan hartanya.¹³

Adapun syarat-syarat wali seperti yang tercantum di dalam buku pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah sebagai berikut :

- a) Beragama Islam
- b) Baligh
- c) Berakal
- d) Tidak dipaksa
- e) Terang lelakinya
- f) Adil (bukan fasik)
- g) Tidak sedang ihrom haji
- h) Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah
- i) Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.

Oleh karena itu sebaiknya wali nya lah yang menikahkan karena cerdas yang mereka artikan hanya dari segi memperoleh pendidikan formal, padahal tidak hanya sebatas itu saja. Wali yang tidak berpendidikan tinggi juga punya hak untuk jadi wali bagi putrinya, jadi jangan merasa minder.

5. Faktor karena merasa masih banyak dosa (Responden 13 dan 14)

Dalam melaksanakan akad nikah, tidak ada rukun yang menyebutkan bahwa wali harus orang yang tidak berdosa. Menurut penulis, hal diatas termasuk dari wali

¹³ *Ibid*, h.77.

fasik. Mengikut pendapat Mazhab Syafi'i dan Hambali, wali *fasik* tidak boleh atau tidak sah menjadi wali nikah. Ini berdasarkan sabda Nabi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. (رواه الامام الشافعي)

“Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah sah aqad nikah kecuali dengan wali yang mursyid dan dua orang saksi yang adil.” (HR. Imam Asy-Syafi'i)

Dalam hal wali nikah, harus orang Islam yang baik (tidak *fasik*) karena orang *fasik* itu tidak jujur dalam menjadi saksi, apalagi menjadi wali.¹⁴ Yang dikatakan *fasik* yaitu orang yang mengerjakan dosa besar secara terang-terangan atau terus-menerus membuat dosa kecil. Orang yang tak terang-terangan mengerjakan pekerjaan yang membawa kepada *fasik*, boleh jadi wali karena sangat jarang manusia yang tidak membuat salah kepada Allah baik secara lahir maupun batin.¹⁵

Ulama-ulama di Khurasan memfatwakan bahwa orang *fasik* boleh jadi wali karena Rasulullah pernah mengatakan bahwa wali dan saksi itu hendaklah orang yang adil, yaitu adil pada lahirnya saja.

Sedangkan yang dimaksud dengan adil ialah seseorang itu berpegang kuat (*istiqamah*) kepada ajaran Islam, menunaikan kewajiban agama, mencegah dirinya melakukan dosa-dosa besar seperti berzina, minum arak, durhaka kepada ibu bapak dan sebagainya serta berusaha tidak melakukan dosa-dosa kecil.¹⁶

¹⁴ Al-Imam Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini asy-Syafi'i, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, op.cit. h. 281.

¹⁵ H. Aminullah, *Pedoman dan Hukum-hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Islam, 1995), h. 38.

¹⁶ Al-Imam Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini asy-Syafi'i, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, loc.cit.

Wali bersifat adil disyaratkan karena ia dianggap bertanggung jawab dari segi kehendak agama ketika membuat penilaian bakal suami bagi kepentingan dan maslahat perempuan yang hendak menikah itu. Manakala wali *fasik* itu sendiri sudah tidak bertanggung jawab ke atas dirinya apa lagi hendak bertanggung jawab kepada orang lain. Untuk menentukan seseorang wali itu bersifat adil atau *fasik* adalah memadai dilihat dari segi *zahir* atau luaran saja ataupun memadai, wali kefasikannya tidak diketahui karena untuk menilai kefasikan secara batin itu sangat susah.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa responden sebagai wali yang merasa masih banyak dosa, tetap boleh menikahkan putrinya sendiri tanpa harus mewakilkannya pada orang lain.

6. Faktor Kebiasaan/adat (Responden 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22)

Kebiasaan mewakilkan hak perwalian dalam akad nikah sudah menjadi budaya di masyarakat Banjar, hal ini terbukti dari semua masyarakat di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur, kebanyakan orang tua selalu mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain, walaupun orang tua tersebut sebenarnya mampu untuk menikahkan sendiri putrinya.

Yang menjadi catatan peneliti adalah bahwa kebanyakan responden yang berwakil wali adalah merupakan adat atau *'urf* yang telah membudaya. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *al- 'urf al-shâhih* baik yang menyangkut *al- 'urf al-lafzhî*, *al- 'urf al- 'amali* maupun menyangkut *al- 'urf al- 'âm* dan *al'urf al-khâsh*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Menurut Imam al-Qarafi (ahli fiqh Maliki) yang dikutip oleh Harun Nasroen menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan

suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemasalahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.¹⁷

Dengan mengutip pendapat Imam Al-Syathibi (ahli ushul fiqh Maliki) dan Ibn Qayyim Al-Jauzi (ahli ushul fiqh Hanbali) Nasrun Haroen juga menyatakan bahwa seluruh ulama mazhab menerima dan menjadikan '*urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan hukum masalah yang sedang dihadapi.¹⁸ Misalnya, seseorang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya ia di dalam kamar mandi dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan hukum syari'at Islam dalam suatu akad, kedua hal ini harus jelas. Akan tetapi, perbuatan seperti itu telah berlaku luas ditengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini. Alasan mereka adalah adat perbuatan yang berlaku. Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa adat (*urf*) merupakan sumber hukum yang diambil oleh Mazhab Hanafi dan Maliki.¹⁹

Perbedaan diantara para fuqaha' adalah perbedaan adat dimana mereka hidup. Dari berbagai kasus adat yang dijumpai, para ulama' ushul fiqh merumuskan kaidah-

¹⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997) Cet. 2, h.142.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, "*Ushul al-Fiqh*" diterjemahkan oleh, Saefullah Ma'shum dkk dengan judul, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), Cet.5, h. 416.

kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat, misalnya *ial 'adah muhakkamah* yang artinya Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum.

Adat bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁰

- a. Berlaku secara umum.
- b. Telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
- c. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d. Tidak bertentangan dengan *nash*.

Sementara itu sebagian masyarakat beranggapan bahwa yang berhak menikahkan anak perempuannya adalah penghulu atau petugas KUA, menurut mereka tugas orang tua hanyalah mencari calon suami yang baik buat anak perempuannya atau hanya memberikan restu pada calon suami pilihan putrinya. Itu disebabkan karena keadaan yang sudah menjadi kebiasaan tersebut, sehingga pola pikir mereka terhadap peran dan tugas seorang wali juga berbeda.

Namun demikian praktik *wa>kalah}* wali dalam akad nikah walaupun terjadi di semua pernikahan namun dilakukan dengan sangat sederhana, dalam *waka>lah}* ini juga tidak ada surat kuasa dari *al-Muwakkil* (pemberi kuasa) kepada *al-Wakil* (penerima kuasa), kecuali pemberi kuasa berada jauh dan tidak bisa hadir di tempat berlangsungnya akad nikah. Seperti yang terdapat dalam kitab *al-Fiqh}ul 'Isla>mi> wa 'Adillatuh}u* :

²⁰ Nasrun Haroen, *op.cit.*,h.143.

كُلُّ مَا جَاءَ رَ لِّإِنْسَانٍ أَنْ يُبَا شَرُّهُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِنَفْسِهِ, جَا زَلَهُ أَنْ يُوَكَّلَ غَيْرُهُ فِيهِ, إِذَا كَانَ
التَّصَرُّفُ يَقْبَلُ النَّيَا بَةً.²¹

“Tiap-tiap sesuatu pengelolaan yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, maka ia boleh mewakili kepada orang lain, apabila sesuatu pengelolaan itu dapat digantikan.”

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan wali nikah di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur mewakili hak walinya kepada orang lain dalam menikahkan putrinya. Kebolehan wakil dalam perkawinan berdasarkan dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص.م. فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ رَجُلٌ زَوَّجْنِيهَا قَالَ قَدْ زَوَّجْنَا لَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. (رواه
البخارى)

Dari Sahl bin Sa’ad RA. Ia berkata: Pernah ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. Lalu bertanya: Ya Rasulullah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Maka berkata seorang laki-laki kawinkanlah aku dengannya. Rasulullah bersabda: Telah kami kawinkan engkau dengan dia dengan mas kawin Al-qur’an yang telah engkau hafalkan.²² (HR. Bukhari)

Islam mensyariatkan waka>lah} karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya.

²¹ Wahbah} az-Zuh}ayli>, *al-Fiqh}ul ‘Isla>mi> wa ‘Adillatuh}u*, *op.cit*, h.4059.

²² Imam Az-Zabidi, *Ringkasan S}ah}i>h} al-Bukha>ri>*, *op.cit*, h. 506.

Adapun dalam hal pelimpahan kekuasaan berwakil wali dapat dilakukan dengan ucapan maupun tulisan.

Dalam Kitab *al-Fiqh}ul 'Isla>mi> wa 'Adillatuh}u* disebutkan:

وَصَحُّ التَّوَكُّلِ بِالْعِبَارَةِ أَوْ الْكِتَابَةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ بِالِاتِّفَاقِ، إِلَّا شَهَادَةُ عِنْدَ صُدُورِ التَّوَكُّلِ، وَإِنْ كَانَ
يَسْتَحْسِنُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى التَّوَكُّلِ، لِلِاحْتِيَاظِ خَوْفًا مِنَ الْإِنْكَارِ عِنْدَ النَّزْعِ.²³

“Perwakilan dapat dilakukan dengan ungkapan atau tulisan. Para fuqaha sepakat bahwa tidak disyaratkan adanya saksi pada saat perwakilan dilakukan. Meskipun alangkah baiknya jika si wakil mendatangkan saksi bagi aqad perwakilan untuk tindakan kewaspadaan akibat rasa khawatir terhadap pengingkaran manakala terjadi persengketaan”²⁴

Dari faktor-faktor yang menyebabkan wali berwakil diatas seharusnya tidak dapat dijadikan alasan untuk mewakilkan hak perwaliannya pada orang lain karena wali masih berkemampuan untuk menikahkan putrinya sendiri sebab jika wali nasabnya sendiri yang menikahkan itu lebih afdol kecuali karena alasannya gugup, sebab gugup merupakan sesuatu yang terjadi dari dalam diri manusia sendiri dan tidak dikehendaki datangnya rasa gugup itu. Meski demikian, pernikahan yang diwakilkan oleh wali yang hadir di tempat majelis nikah dan sehat secara fisik itu tetap sah.

²³ Wahbah } az-Zuh}ayli>, *al-Fiqh}ul 'Isla>mi> wa 'Adillatuh}u*, Ibid. h. 6726.

²⁴ Wahbah } az-Zuh}ayli *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2007) Jilid 9,h. 206.